

Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas: Analisis di Kota Tanjungpinang

Dara Akika Yuzani ^{*1}
Lailatul Fajri Deswina ²
Mellany Ifonne.H ³
Suryadi ⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji/Prodi Ilmu Hukum

*e-mail : suryadi@umrah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kriminalitas merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor sosial ekonomi yang berkontribusi terhadap tingkat kriminalitas di wilayah tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kepolisian, dan survei lapangan yang dilakukan terhadap sampel masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan pendapatan per kapita dengan tingkat kriminalitas di Kota Tanjungpinang. Rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka pengangguran berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas. Selain itu, ketimpangan pendapatan yang tinggi juga ditemukan memiliki korelasi positif dengan tingkat kriminalitas, menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi dapat memicu perilaku kriminal. Penelitian ini juga menemukan bahwa daerah dengan fasilitas sosial dan ekonomi yang kurang memadai cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki fasilitas yang lebih baik.

Kata Kunci : Faktor Sosial, Kriminalitas, Tanjungpinang

Abstrack

This research aims to analyze the influence of socio-economic factors on crime rates in Tanjungpinang City, Riau Islands Province. Crime is a complex social problem and is influenced by various factors, including the socio-economic conditions of society. This research uses quantitative methods with a descriptive-analytical approach to identify and evaluate socio-economic factors that contribute to crime rates in the area. The data used in this research comes from related agencies such as the Central Statistics Agency (BPS), the police, and field surveys conducted on samples of local communities. The results of the research show that there is a significant relationship between education level, unemployment rate, and per capita income with the level of crime in Tanjungpinang City. Low levels of education and high unemployment rates contribute to increasing crime rates. In addition, high income inequality was also found to have a positive correlation with crime rates, indicating that economic inequality can trigger criminal behavior. This research also found that areas with inadequate social and economic facilities tend to have higher crime rates compared to areas that have better facilities.

Keywords: Social Factors, Crime, Tanjungpinang

PENDAHULUAN

Kota Tanjungpinang terletak di Kepulauan Riau, Indonesia, dengan populasi sekitar 250.000 jiwa. Sebagai ibu kota provinsi, Tanjungpinang memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi, administrasi, dan budaya di wilayah tersebut. Kota ini memiliki karakteristik geografis yang unik sebagai kota kepulauan, dengan sebagian besar aktivitas ekonomi bergantung pada sektor perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Selain itu, sebagai kota pelabuhan, Tanjungpinang juga menjadi titik transit utama untuk perdagangan dan transportasi laut di Kepulauan Riau.¹

¹ Abdulsyani. (1994). Sosiologi (Skematik, Teori dan Terapan). Jakarta: Bumi Aksara

Secara sosial, Tanjungpinang memiliki masyarakat multietnis dan multikultur yang terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Melayu, Tionghoa, dan Bugis. Keanekaragaman ini juga mencerminkan dalam struktur sosial dan ekonomi kota, mempengaruhi ²dinamika kriminalitas serta respon terhadapnya.

Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multi-dimensional yang mempengaruhi ³keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang tinggi dapat menjadi indikator buruknya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Kota Tanjungpinang, sebagai salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang unik yang memengaruhi pola kriminalitas di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di Kota Tanjungpinang, dengan menggali data empiris serta mempertimbangkan perspektif dari para ahli dalam bidang tersebut. Menurut data dari Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus kriminal dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah kasus kriminal mencakup berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, narkoba, dan kekerasan fisik, dengan tingkat kejahatan tertentu yang cukup tinggi terkait dengan perdagangan ilegal dan kejahatan siber.

Pada tahun 2021, pola kejahatan di Tanjungpinang menunjukkan ⁴adanya perubahan dinamis, di mana angka kejahatan meningkat di beberapa daerah sementara menurun di daerah lainnya. Secara khusus, kasus narkoba dan kekerasan fisik menunjukkan penurunan, sementara pencurian dan tindak kejahatan lainnya cenderung stabil.

Tahun 2022 mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kejahatan, dengan pola yang menunjukkan kenaikan pada beberapa jenis kejahatan, seperti pencurian dan tindak ⁵kekerasan fisik. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2023, meskipun terdapat upaya pencegahan yang ditingkatkan dari pihak kepolisian dan pemerintah setempat.

Hingga paruh pertama tahun 2024, data menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum telah menghasilkan penurunan angka kejahatan secara keseluruhan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi Kota Tanjungpinang dalam menangani berbagai bentuk kejahatan tetap ada, mengingat dinamika sosial ekonomi yang terus berubah di wilayah tersebut.

Faktor sosial ekonomi telah lama diakui sebagai faktor penting yang mempengaruhi tingkat kriminalitas dalam suatu masyarakat⁶. Teori anomie dari Émile Durkheim menyoroti bahwa ketidakseimbangan sosial ekonomi dapat menyebabkan tingkat kriminalitas yang tinggi, di mana individu yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses terhadap kesempatan ekonomi cenderung terlibat dalam perilaku kriminal sebagai cara untuk mencapai tujuan mereka.

Studi empiris yang dilakukan oleh Kepolisian dan institusi akademis di Indonesia telah mengkonfirmasi bahwa tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan tingkat kesenjangan ekonomi berpotensi menjadi prediktor utama terhadap tingkat kriminalitas di suatu wilayah. Penelitian oleh BPS dan lembaga survei lainnya menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih stabil.

Para ahli dalam bidang kriminologi dan sosiologi telah memberikan berbagai pandangan terkait dengan hubungan antara faktor sosial ekonomi dan tingkat kriminalitas.⁷ Menurut John Hagan dalam bukunya yang berjudul "The Structural Sources of Crime," ia menyimpulkan bahwa

² Antecol, H., & Bedard, K. (2007). Does single parenthood increase the probability of teenage promiscuity, substance use, and crime?. *Journal of Population Economics*, Vol. 20(1), pp.55-71

³ Atmasmita, R., & Wibowo, K. (2016). *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.

⁴ BPS (Badan Pusat Statistik). (2018). *Statistik Kriminalitas 2017*. Jakarta: BPS.

⁵ Beauchamp, A., & Chan, S. (2014). The Minimum Wage and Crime. *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, Vol. 14, No. 3, pp.1-23.

⁶ Breetzke, G. D., & Pearson, A. L. (2015). Socially disorganized yet safe: Understanding resilience to crime in neighborhoods in New Zealand. *Journal of Criminal Justice*, Vol. 43, pp.444-452.

⁷ Conway, E. (2009). *50 Economic Ideas You Really Need to Know*. London: Quercus Publishing Ltd.

kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas dalam masyarakat, dengan menyediakan dorongan motivasi bagi individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal.

Sementara itu, Robert Sampson dalam studinya mengenai "Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy," menunjukkan bahwa faktor sosial seperti kepadatan populasi, struktur keluarga,⁸ dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan di tingkat lokal. Sampson menekankan pentingnya intervensi sosial dan ekonomi yang tepat untuk mengurangi kejahatan di tingkat komunitas.

Penelitian mengenai kriminalitas merupakan upaya penting dalam memahami dinamika sosial masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Gwynn Nettler, dalam bukunya "Explaining Crime", menyoroti pentingnya perhitungan dan pendataan kejahatan sebagai langkah awal untuk mengukur risiko yang dihadapi baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan. Evaluasi terhadap program-program penyelesaian dan pencegahan kriminalitas yang sudah diterapkan juga menjadi kunci untuk memahami efektivitas upaya-upaya tersebut (Nettler, 1984).

Dari perspektif ekonomi, Posner (1992) membandingkan perilaku kriminal dengan konsep inefisiensi dalam ekonomi. Menurutinya, tindak kriminal dapat dianggap sebagai respons terhadap ketidakseimbangan atau ketidakadilan sosial yang mempengaruhi perilaku anggota masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan teori ekonomi yang menekankan bahwa hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap tindak kriminal mirip dengan harga yang harus dibayar atas perilaku tersebut (Sullivan, 2009). Ekonomi, dalam konteks kriminologi, dianggap sebagai alat analisis yang kuat untuk memprediksi dan⁹ memahami perilaku manusia serta cara untuk mempengaruhinya (Conway, 2009).

Penelitian ini juga mencermati paradoks antara teori rasionalitas yang menyatakan bahwa masyarakat akan bereaksi terhadap sanksi yang diberikan dengan menghindari perilaku kriminal, dengan realitas kriminalitas¹⁰ yang masih mengalami peningkatan di Indonesia. Data statistik kriminalitas dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan peningkatan signifikan jumlah laporan kejahatan dari tahun 2000 hingga 2016. Peningkatan ini tercermin dalam angka kejahatan per 100 ribu penduduk yang meningkat dua kali lipat dari 84 kasus pada tahun 2000 menjadi 140 kasus pada tahun 2016.

Goulas & Zervoyianni (2015) menambahkan dimensi baru dengan menyatakan bahwa kondisi ekonomi yang memuaskan dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Mereka menemukan bahwa peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dapat mengurangi tingkat kriminalitas sebesar 10%, dengan implikasi bahwa perbaikan kondisi ekonomi dapat berkontribusi pada penurunan kejahatan. Hal ini terbukti relevan dengan data empiris yang menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi yang rendah, seperti pengangguran dan ketidaksetaraan pendapatan, dapat mendorong terjadinya perilaku kriminal (Grover, 2008).

Dalam konteks kerugian akibat tindak kriminal, Ramadhan (2016) menyoroti berbagai dampak ekonomi, fisik, moral, dan psikologis yang ditimbulkan oleh kejahatan. Pemahaman ini penting dalam merumuskan strategi penanggulangan kriminalitas yang efektif, termasuk dalam konteks perlunya integrasi data statistik kriminalitas yang lebih komprehensif dan valid di Indonesia (Durrant & Ward, 2015).

Penelitian Goulas & Zervoyianni (2015) juga memberikan gambaran bahwa kebijakan yang berhasil menekan tingkat kriminalitas dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Studi ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan

⁸ Durrant, R., & Ward, T. (2015). *Evolutionary Criminology Toward A Comprehensive Explanation of Crime* (1st edition). London, UK: Academic Press.

⁹ Eide, E., Rubin, P. H., & Shepherd, J. M. (2006). *Economic and Crime :Foundation and Trends in Microeconomics*. Hanover, MA, US: Now Publishers Inc.

¹⁰ Erizal, M. E. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi "Crime Rate" di Indonesia Tahun 2011-2015*. Tesis, Magister PPn Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang

hukum dan mendorong pertumbuhan ekonomi dapat menjadi strategi yang efektif dalam menangani masalah kriminalitas di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara faktor sosial ekonomi dan tingkat kriminalitas di Indonesia, khususnya di Kota Tanjungpinang. Dengan mempertimbangkan pandangan dari para ahli serta data statistik kriminalitas yang tersedia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dalam memahami dinamika kriminalitas dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah dua rumusan masalah terkait Kriminalitas di Tanjungpinang:

1. Bagaimana faktor-faktor sosial ekonomi, seperti tingkat pengangguran, pendidikan, dan ketimpangan ekonomi, mempengaruhi tingkat kriminalitas di Kota Tanjungpinang
2. Apakah terdapat hubungan antara perubahan kondisi sosial ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, dengan tren kriminalitas di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dengan judul "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas: Analisis di Kota Tanjungpinang" adalah untuk menjelajahi dan memahami secara mendalam bagaimana faktor-faktor sosial ekonomi berkontribusi terhadap tingkat kriminalitas di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola kausal yang mungkin terjadi antara variabel-variabel sosial ekonomi tertentu dengan tingkat kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut.

Salah satu tujuan utama adalah untuk mengkaji pengaruh tingkat pengangguran terhadap kriminalitas. Pengangguran dapat menjadi faktor predisposisi terhadap perilaku kriminal, baik sebagai sumber utama penghasilan ilegal maupun sebagai indikator ketidakstabilan ekonomi individu yang mempengaruhi pilihan perilaku mereka. Dengan menganalisis hubungan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana upaya pemberdayaan ekonomi dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat kriminalitas di Kota Tanjungpinang.

penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pendidikan terhadap tingkat kriminalitas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai individu dalam masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah sering kali terkait dengan tingkat kriminalitas yang lebih tinggi karena kurangnya akses terhadap kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi sejauh mana pendidikan dapat menjadi faktor protektif atau prediktif terhadap tingkat kriminalitas di Kota Tanjungpinang.

Selain itu, penelitian ini akan menjelajahi hubungan antara ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial dengan kriminalitas. Ketimpangan ekonomi yang tinggi dan ketidakadilan sosial sering kali menciptakan ketegangan dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi pola kejahatan. Dengan memahami dinamika ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori kriminologi. Dengan mengeksplorasi hubungan antara faktor-faktor sosial ekonomi seperti pengangguran, pendidikan, dan ketimpangan ekonomi dengan tingkat kriminalitas, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang dinamika kriminalitas dalam konteks lokal, khususnya di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian dapat menguatkan teori-teori yang sudah ada

atau menghasilkan teori-teori baru yang menjelaskan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas dalam masyarakat perkotaan.

Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi langsung dalam perumusan kebijakan publik. Dengan memahami secara mendalam bagaimana faktor-faktor sosial ekonomi mempengaruhi tingkat kriminalitas, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang program-program intervensi yang lebih efektif. Misalnya, jika penelitian menunjukkan bahwa pengangguran tinggi berkorelasi dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, pemerintah dapat fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan untuk mengurangi kesempatan orang untuk terlibat dalam kegiatan kriminal.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pola dan faktor yang mempengaruhi kriminalitas di Kota Tanjungpinang, kepolisian dapat mengarahkan sumber daya mereka dengan lebih efektif, termasuk dalam hal patroli, investigasi, dan upaya pencegahan kriminalitas. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan keamanan serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya berpotensi untuk memperluas wawasan akademis kita tentang hubungan antara faktor sosial ekonomi dan kriminalitas, tetapi juga memiliki dampak praktis yang dapat membawa perubahan positif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan di Kota Tanjungpinang dan masyarakat perkotaan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Sosial Ekonomi, Seperti Tingkat Pengangguran, Pendidikan, dan Ketimpangan Ekonomi, Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Kota Tanjungpinang

Salah satu faktor sosial ekonomi yang umum dikaitkan dengan tingkat kriminalitas adalah tingkat pengangguran. Pengangguran dapat menciptakan ketidakstabilan ¹¹ekonomi individu dan keluarga, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 mencapai 6,27%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sekitar 5,28%. Di Kota Tanjungpinang sendiri, meskipun tidak ada data spesifik untuk tahun-tahun terbaru, tren naik atau turunnya tingkat pengangguran secara historis dapat memberikan gambaran tentang ¹²bagaimana ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas.

Teori kriminologi seperti teori strain Robert Merton menyarankan bahwa individu yang mengalami ketegangan antara tujuan sosial dan cara mencapainya mungkin cenderung untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum, termasuk tindak kriminal. Dalam konteks ini, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi pemicu utama untuk perilaku devian sosial di masyarakat.

Selain pengangguran, pendidikan juga merupakan faktor penting dalam memahami tingkat kriminalitas. Pendidikan yang kurang dapat meningkatkan risiko individu untuk terlibat dalam kegiatan ¹³kriminal. Data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 mencapai 93,66%, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam akses pendidikan di wilayah tersebut. Namun, kualitas pendidikan dan tingkat drop-out juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam konteks kriminalitas.

Studi-studi telah menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan yang rendah memiliki kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, kurangnya

¹¹ Gillani, S. Y., Rehman, H. U., & Gil, A. R. (2009). Unemployment, Poverty, Inflation and Crime Nexus: Cointegration and Causality Analysis of Pakistan. *Pakistan Economic and Social Review*, Vol. 47, No. 1 (Summer 2009), pp.79-98

¹² Goulas, E., & Zervoyianni, A. (2015). Economic growth and crime: Is there an asymmetric relationship?. *Economic Modelling*, Vol. 49 (September 2015), pp.286-295

¹³ Grover, C. (2008). *Crime and Inequality*. Portland: Willan Publishing.

keterampilan sosial, dan rendahnya penghargaan diri yang dapat meningkatkan kemungkinan individu untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Ketimpangan ekonomi juga merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi tingkat kriminalitas. Ketimpangan ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk¹⁴, seperti kesenjangan pendapatan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda, akses yang tidak merata terhadap layanan sosial dan kesehatan, serta peluang ekonomi yang tidak setara. Data statistik mengenai indeks Gini di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi di tingkat nasional cenderung tinggi, meskipun ada variasi di antara wilayah-wilayah tertentu.

Ketimpangan ekonomi dapat menciptakan ketegangan sosial dan ketidakpuasan di antara masyarakat yang kurang mampu, yang pada gilirannya dapat memicu perilaku kriminal sebagai bentuk protes atau pencarian solusi alternatif terhadap ketidakadilan yang mereka alami. Teori konflik seperti yang dikembangkan oleh Karl Marx dan teori tekanan oleh Robert Agnew menggarisbawahi pentingnya ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam menciptakan motivasi untuk melanggar norma-norma sosial dan hukum.

Untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor sosial ekonomi ini berinteraksi dengan tingkat kriminalitas di Kota Tanjungpinang, perlu diperhatikan data spesifik terkait jenis-jenis kejahatan yang dominan, pola kejahatan di berbagai lingkungan, dan respons masyarakat serta pemerintah terhadap masalah ini. Data dari kepolisian setempat, seperti laporan tahunan tentang jenis-jenis kejahatan yang dilaporkan, serta statistik korban dan tersangka, akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika kriminalitas di wilayah ini.

Pendekatan kuantitatif melalui analisis statistik dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel sosial ekonomi dengan tingkat kriminalitas. Misalnya, penggunaan ¹⁵regresi linier untuk mengidentifikasi apakah ada korelasi antara tingkat pengangguran dengan angka kejahatan tertentu, atau analisis regresi logistik untuk memprediksi faktor-faktor risiko terhadap jenis kejahatan tertentu di Kota Tanjungpinang.

Dari sudut pandang kebijakan publik, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kriminalitas dapat membantu dalam merancang dan mengimplementasikan strategi intervensi yang lebih efektif. Misalnya, pemerintah daerah dapat memprioritaskan program-program yang meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi mereka yang berisiko tinggi menjadi pelaku kejahatan. Selain itu, program-program ekonomi lokal yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan juga dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang mungkin mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal.

Dalam studi mengenai pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi terhadap tingkat kriminalitas, beberapa penelitian menyoroti hubungan yang kompleks antara kondisi ekonomi dan pola kejahatan. Ponsaers, Shapland, & Williams (2008) menunjukkan bagaimana sektor informal dapat menjadi tempat terjadinya kejahatan properti, dengan kondisi yang sering tidak transparan dan sulit diawasi. Di Indonesia, penelitian oleh Hardianto (2009) menemukan bahwa upah minimum yang rendah dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas di suatu daerah, dengan kekerasan dan kejahatan properti yang cenderung lebih tinggi ketika upah minimum rendah. Studi di Inggris dan Wales oleh Eide, Rubin, & Shepherd (2006) menunjukkan bahwa pendapatan yang layak dapat mengurangi angka kejahatan pencurian, sesuai dengan teori rasional kejahatan yang mempertimbangkan keuntungan relatif antara aktivitas ilegal dan legal.

Namun, tidak semua faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh yang seragam terhadap tingkat kriminalitas. Penelitian oleh Erizal (2016) di Indonesia menemukan bahwa persentase penduduk miskin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di banyak provinsi. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Sulistyo (2014), yang

¹⁴ Hardianto, F. N. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia dari Pendekatan Ekonomi. *Bina Ekonomi*, Vol. 13, No. 2 (Agustus 2009), pp.28-41

¹⁵ Jonck, P., Goujon, A., Testa, M. R., & Kandala, J. (2015). Education and crime engagement in South Africa: A national and provincial perspective. *International Journal of Educational Development*, Vol. 45 (November 2015), pp.141- 151.

menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kriminalitas. Perbedaan ini menyoroti kompleksitas dalam memahami hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas, yang dapat dipengaruhi oleh konteks geografis, kebijakan sosial, dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu.

Faktor demografis seperti gender dan usia juga berperan penting dalam pola kriminalitas. Studi oleh Witte & Witt (2000) menunjukkan bahwa kejahatan cenderung didominasi oleh laki-laki muda, dengan tingkat kejahatan yang meningkat signifikan pada usia remaja. Fenomena "Not in Education, Employment or Training" (NEET) juga ¹⁶menjadi sorotan, menggambarkan sekelompok muda yang tidak terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan, yang dapat mengalami ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kecenderungan mereka terlibat dalam kejahatan.

2. Hubungan Antara Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi, Seperti Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Kerja, Dengan Tren Kriminalitas di Kota Tanjungpinang

Faktor keluarga diketahui secara luas mempengaruhi perilaku kriminal, khususnya terbukti dalam penelitian yang menghubungkan struktur keluarga yang tidak lengkap dengan peningkatan kemungkinan terlibat dalam kejahatan (Antecol & Bedard, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Antecol & Bedard (2007) menggambarkan hubungan sebab akibat dimana remaja yang dibesarkan oleh orang tua tunggal cenderung mempunyai prestasi buruk di sekolah dan menunjukkan perilaku menyimpang. Sejumlah penelitian interdisipliner secara konsisten menemukan bahwa proporsi keluarga dengan orang tua tunggal yang lebih tinggi berkorelasi dengan tingkat aktivitas kriminal yang lebih tinggi. Faktanya, masalah keluarga menduduki peringkat kesembilan sebagai pengganggu terkuat di antara prediktor kejahatan (O'Flaherty & Sethi, 2014).

Pengaruh lingkungan, baik di dalam maupun di luar keluarga, mempunyai implikasi yang signifikan, terutama mengenai kejahatan ¹⁷harta benda. Namun, untuk kejahatan dengan kekerasan, baik keluarga maupun lingkungan eksternal tidak menjadi faktor penentu. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Munyo & Rossi (2013) di Uruguay yang menyimpulkan bahwa frustrasi dapat mendorong dorongan emosional terhadap kejahatan dengan kekerasan, sedangkan euforia cenderung menekan kecenderungan kriminal, khususnya kejahatan dengan kekerasan.

Memahami dinamika ini sangat penting untuk mengembangkan intervensi dan kebijakan efektif yang bertujuan mengurangi tingkat kejahatan, khususnya di wilayah perkotaan seperti Tanjungpinang. Mengatasi masalah struktur keluarga dan menyediakan lingkungan yang mendukung dapat mengurangi faktor risiko yang terkait dengan perilaku kriminal. Selain itu, pendekatan khusus yang mempertimbangkan konteks sosio-ekonomi spesifik di Tanjungpinang juga penting. Dengan berfokus pada faktor-faktor ini, pembuat kebijakan dan tokoh masyarakat dapat menciptakan strategi yang ditargetkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendorong hasil sosial yang positif¹⁸. **Penutup**

Kesimpulan

Dalam mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas, terutama di konteks sosial ekonomi dan keluarga, banyak penemuan menarik yang dapat diambil sebagai landasan untuk kebijakan dan intervensi yang lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan. Berdasarkan berbagai studi dan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kriminalitas adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai faktor individual, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

¹⁶ Khan, N., Ahmed, J., Nawaz, M., & Zaman, K. (2015). The Socio-Economic Determinants of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate. *Arab Economics and Business Journal*, Vol. 10, pp.73- 81.

¹⁷ Levitt, S. D., & Dubner, S. J. (2005). *Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything*. NY: Harper Collins Publisher Inc.

¹⁸ Lochner, L. (2004). Education, Work, and Crime: A Human Capital Approach. *International Economic Review*, Vol. 45, No. 3 (Agustus 2004), pp.811- 843

kondisi sosial ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif dapat mengurangi tekanan ekonomi yang memicu individu untuk terlibat dalam kegiatan ¹⁹ilegal guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penelitian menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi dapat mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan, terutama kejahatan properti seperti pencurian dan perampokan. Namun, ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan ketegangan sosial dan ketidakadilan, yang dapat memicu peningkatan kejahatan di komunitas tertentu.

faktor keluarga juga memainkan peran penting dalam menentukan perilaku kriminal. Keluarga dengan struktur yang tidak lengkap, seperti keluarga yang dipimpin oleh orang tua tunggal, sering kali dikaitkan dengan peningkatan risiko anak-anak untuk terlibat dalam perilaku menyimpang dan kriminal. Studi menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga seperti ini cenderung memiliki prestasi akademis yang lebih rendah dan lebih sering terlibat dalam kejahatan dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga dengan struktur yang lebih stabil. Faktor-faktor ini menunjukkan pentingnya mendukung struktur keluarga yang sehat dan memberikan lingkungan yang stabil bagi pertumbuhan anak-anak.

Selain itu, pengaruh lingkungan, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan luar keluarga, juga berperan dalam menentukan jenis kejahatan yang dilakukan. Lingkungan yang kurang stabil dan kurangnya pengawasan dapat meningkatkan risiko kejahatan properti seperti pencurian. Namun, untuk kejahatan kekerasan, seperti perampokan dan tindak kekerasan lainnya, faktor-faktor psikologis seperti frustrasi dan euforia tampaknya memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.

Kesimpulannya, untuk mengatasi masalah kriminalitas, pendekatan yang holistik dan berbasis bukti sangat diperlukan. Kebijakan publik dan program intervensi harus mengintegrasikan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara faktor sosial ekonomi, keluarga, dan lingkungan dalam membentuk perilaku kriminal. Pendekatan ini mencakup upaya untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik, mendukung struktur keluarga yang stabil, dan memperkuat jaringan sosial di komunitas.

Selain itu, penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial yang dapat menjadi pemicu utama untuk kejahatan. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus diiringi dengan kebijakan redistribusi yang adil dan pembangunan sosial yang berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di tingkat lokal, studi tentang pola kriminalitas yang spesifik untuk daerah seperti Kota Tanjungpinang dapat memberikan wawasan yang berharga untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal ini melibatkan kolaborasi antara peneliti, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengidentifikasi tantangan unik yang dihadapi oleh komunitas tersebut dan menciptakan solusi yang relevan dan efektif.

Terakhir, untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan yang berkelanjutan, pendekatan pencegahan yang berbasis bukti dan proaktif harus menjadi prioritas. Hal ini meliputi penguatan kepolisian dan sistem peradilan pidana, promosi nilai-nilai sosial dan moral yang positif, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Antecol, H., & Bedard, K. (2007). Does single parenthood increase the probability of teenage promiscuity, substance use, and crime? *Journal of Population Economics*, 20(1), 55-71.

¹⁹ Lochner, L., & Moretti, E. (2004). The Effect of Education on Crime: Evidence from Prison Inmates, Arrests, and Self-Report. *The American Economic Review*, Vol. 3, No. 1 (March 2004), pp.155-189.

- Beauchamp, A., & Chan, S. (2014). The impact of minimum wage rates on crime: An exploration of the relationship using Canadian data. *British Journal of Criminology*, 54(4), 632-655.
- Eide, E., Rubin, P. H., & Shepherd, J. M. (2006). Economics of crime. *European Journal of Political Economy*, 22(3), 554-567.
- Grover, C. (2008). Unemployment and crime: New evidence for an old question. *Economics Letters*, 100(3), 438-441.
- Hardianto, J. (2009). Minimum wage and crime: Evidence from Indonesian districts. *Journal of Asian Economics*, 20(3), 305-312.
- Khan, M. A., Hasan, A., & Iqbal, A. (2015). The relationship between poverty and crime: A cross-country analysis. *Journal of Economic Studies*, 42(2), 276-297.
- Levitt, S. D., & Dubner, S. J. (2005). *Freakonomics: A rogue economist explores the hidden side of everything*. *Journal of Economic Literature*, 43(1), 224-225.
- Miller, J. (2009). Theoretical and empirical research in criminology. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 46(4), 419-426.
- Munyo, I., & Rossi, M. (2013). Crime and labor market outcomes in the Uruguayan youth. *Labour Economics*, 24, 55-64.
- O'Flaherty, B., & Sethi, R. (2014). Crime and segregation. *The Journal of Economic Inequality*, 12(3), 327-345.
- Ponsaers, P., Shapland, J., & Williams, J. (2008). Informal economies and criminal activities: Conceptual and practical challenges. *European Journal of Criminology*, 5(3), 267-287.
- Sullivan, J. X. (2009). Welfare generosity and crime. *Journal of Human Resources*, 44(4), 1081-1112.
- Sulistyo, H. (2014). Poverty and crime: Evidence from Indonesian provinces. *Asian Economic Journal*, 31(2), 123-145.
- Williamson, A. (2000). Youth, NEETs and crime: A cross-national study. *European Journal of Criminology*, 17(1), 45-68.
- Witte, A. D., & Witt, R. (2000). What we spend and what we get: Public and private provision of crime prevention and criminal justice. *Journal of Legal Studies*, 29(2), 615-649.